FRAKSI PARTAI NANGGROE ACEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

PENDAPAT AKHIR

Terhadap

RANCANGAN QANUN ACEH

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA)
TAHUN ANGGARAN 2021

DISAMPAIKAN OLEH

TGK HAIDAR
Sekretaris Fraksi PNA DPR Aceh

DALAM RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2020
Banda Aceh, 30 Nopember 2020

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Washalatu Wassalamu'ala Asyrafil Anbiya'i Walmursalin Wa'alaa 'Alihi Washahbihi Ajma'in.

puji dan syukur kita sampaikan kehadhirat Allah SWT, atas limpahan Nikmat, Rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama hadir di tempat yang terhormat ini.

Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat nya, yang telah mewariskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari beliau di Yaumil Mahsyar kelak. Amin ya rabbal 'alamin

Yang kami hormati:

- Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh atau yang mewakili
- Gubernur Aceh;
- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- Pangdam Iskandar Muda;
- Kapolda Aceh;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- Danlanal, Danlanud Sultan Iskandar Muda;
- Rektor Unsyiah dan Rektor UIN Ar- Raniry;
- Ketua MPU, MAA, MPD dan Baitul Mall;

- Sekretaris Daerah Aceh, Para Staf Ahli Gubernur Aceh Para Asisten dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh serta para kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh ;
- Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya;
- Para Insan Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Massa;
- Serta Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Sebagaimana diketahui Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan salah satu Rancangan Qanun Aceh strategis yang menyangkut dengan hajat hidup Rakyat Aceh, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Rakyat Aceh.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Aceh, kemudian penyampaian pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan jawaban/tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi Partai Nanggroe Aceh menyampaikan pendapat akhir fraksi

terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 sebagai perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu Fungsi *Budgeting*.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Secara umum, kami Fraksi Partai Nanggroe Aceh mengapresiasi atas penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Gubernur Aceh atas nama Pemerintah Aceh dengan segala dinamika yang terjadi, hingga proses ini dapat terlaksana saat ini. Namun terdapat beberapa catatan yang patut kami sampaikan dalam forum terhormat ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana terinci pada beberapa bagian di bawah ini :

1. Dengan alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.990.469.972.136,00 ***(Enam belas triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah)*** untuk 4 (empat) prioritas pembangunan Aceh, sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2021 dengan harapan dapat menjawab persoalan mendasar yang dialami oleh Rakyat Aceh selama ini yaitu menyangkut persoalan ekonomi dan kesejahteraan bagi

Rakyat Aceh dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

2. Kita semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksikan masih akan dinamis. Antara lain rencana Pendapatan sebesar Rp. Rp14.183.394.212.942,- ***(Empat belas triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)***, yang terdiri dari Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp. 2.401.682.455.965,- ***(Dua triliun empat ratus satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)*** *atau* (16,93%) dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 11.754.301.755.400,- ***(Sebelas triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)*** atau (82,87%) serta Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 27.410.001.577,- ***(Dua puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*** atau (0,19%).

3. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Aceh

dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemerintah Aceh diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya patut untuk kita perhatikan yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang lebih terintegrasi.

4. Fraksi Partai Nanggroe Aceh dalam hal ini akan memberi perhatian khusus pada program prioritas ke- 3 dan ke- 4 yaitu Penguatan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan tidak mengesampingkan program prioritas yang lain yaitu; Mendorong pemulihan agroindustri dan pemberdayaan UMKM serta Peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing.

   Perhatian khusus untuk Program prioritas ke- 3 dan ke- 4 ini menyangkut dengan :

   - Pembangunan Rumah Sakit Regional

     Sebagaimana yang tercantum dalam Draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2021, adanya program pembangunan Rumah Sakit Regional dengan

total alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000.000,- ***(Seratus delapan puluh milyar rupiah)*** untuk pembangunan 5(lima) Rumah Sakit Regional. Dengan jumlah besaran anggaran tersebut, maka dapat dipastikan Rumah Sakit Regional tidak dapat difungsikan dengan secara maksimal dalam waktu dekat. Kami mengharapkan dalam sisa masa jabatan Gubernur Aceh 2017-2022 untuk dapat menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Regional tersebut.

- JKA Plus

  Salah satu program unggulan yang merupakan janji politik pada masa kampanye PILKADA tahun 2017, Kami dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh mengharapkan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan JKA-Plus yang saat ini belum terlihat keseriusannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2021.

- Ketahanan dan Kemandirian Pangan

  Ketahanan dan kemandirin Pangan menjadi prioritas Pembangunan Aceh di Tahun Anggaran 2021, beberapa isu penting yang harus ditangani serius oleh Pemerintah Aceh untuk mengrealisasi target ini, diantaranya adalah kebubutuhan pupuk dan bibit bagi Petani yang selalu bermasalah di lapangan, untuk realisasi ini penting adanya anggaran yang cukup untuk kontrol dan pengawasan, hal ini belum terlihat dari struktur anggaran

yang telah disusun oleh Pemerintah Aceh di Tahun Anggaran 2021.

Kemudian Saat ini banyak lahan persawahan yang telah dibangun irigasi sudah berubah fungsi menjadi pembangunan komplek perumahan atau fasilitas lainnya. Padahal peningkatan produksi untuk menunjang Ketahanan Pangan sangat ditentukan oleh jumlah lahan yang cukup dengan produktifitas yang tinggi. Untuk itu penting, ada kebijakan yang efektif disertai dengan anggaran yang memadai untuk melindungi lahan pangan, dimana setiap tahunnya terus berkurang. Kami melihat belum adanya mata anggaran yang terkait dengan perlindungan lahan di Tahun Anggaran 2021.

5. Fraksi Partai Nanggroe Aceh meminta penjelasan Pemerintah Aceh terhadap :
   - *Mengapa Pemerintah Aceh, tidak memberi prioritas terhadap penyelesaian Rumah Sakit Regional, atau beberapa diantaranya, agar dapat difungsikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan.*
   - *Bagaimana strategi dan langkah-langkah Pemerintah Aceh, untuk ;*
     - *Melindungi lahan pangan yang selalu berubah fungsi;*

- *Memastikan pupuk subsidi sampai tepat sasaran pada waktu yang dibutuhkan oleh petani pada saat musim tanam;*
- *Memastikan bibit/benih yang berkualitas yang diterima oleh Petani dengan mengoptimalkan hasil penangkaran produk lokal yang telah disertifikasi* .

➢ Mengapa struktur anggaran belum mengarah pada peningkatan kemampuan Aceh dalam kemandirian benih, sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022.

6. Berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana belum juga termuat tentang kewenangan kekhususan Aceh menyangkut dengan program-program dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seperti pembangunan rumah ibadah (Mesjid/Meunasah). Meminta Pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam melakukan advokasi agar dapat diatur di dalam database Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkait dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanan pembangunan dan keuangan Aceh.

7. Terkait dengan pembagian kewenangan perencanaan pembangunan dan keuangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, kerap terjadi persoalan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dimana persoalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dialihkan ke kewenangan pusat atau kabupaten/kota atau sebaliknya, sehingga yang menjadi program prioritas perencanan pembangunan tidak termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena menyangkut dengan pelaksanaan kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan. Hal ini juga sangat berpengaruh pada jumlah besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja yang di miliki oleh Kabupaten/Kota dalam penentuan pelaksanaan kewenangan perencanaan pembangunan dan kemampuan keuangan. Kami menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat melakukan identifikasi kembali terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut sehingga program-program prioritas agar dapat tertampung di dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Aceh.

Sidang Dewan yang terhormat,

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, Maka kami Fraksi Partai Nanggroe Aceh

Sangat sepakat terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam sidang paripurna.

Akhirnya seraya berserah diri kepada Allah SWT, Fraksi Partai Nanggroe Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **Menerima Rancangan Qanun Aceh** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Aceh	Rp. 14.183.394.212.942,-
b. Belanja Aceh	Rp. 16.990.469. 972.136,-
Defisit/Surplus	Rp. (2.807.075.759.194,-)
a. Pembiayaan Aceh	
- Penerimaan	Rp. 2. 887.075.759.194,-
- Pengeluaran	Rp. 80.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 2.807.075.759.194,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0.-

Terakhir, Kami dan tentunya Kita semua berharap, Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 ini agar dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan yang akan datang. Dan akhirnya Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan dapat menjadi

instrument dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi "Aceh Hebat" dan tentu saja dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat Aceh.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Nanggroe Aceh semoga dapat menjadi masukan dalam proses berikutnya.

Terimakasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. *Amin Ya rabbal alamiin*.

Wabillahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Nopember 2020

FRAKSI PARTAI NANGGROE ACEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua	**Sekretaris**
SAFRIJAL	**TGK HAIDAR**

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI NANGGROE ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua	:	**Safrijal**
Wakil Ketua	:	**Mukhtar Daud**
Sekretaris	:	**Tgk. Haidar**
Bendahara	:	**Darwati A Gani**
Anggota	:	**1. Samsul Bahri**
		2. M. Rizal Falevi Kirani